RAKYAT KALBAR

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | 2015 | Hal. : 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ADPPK Komitmen Berantas Korupsi

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012

PONTIANAK-RK. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar sosialisasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), Selasa (28/7), di Aula Abdul Muis Muin, Kantor Bappeda Kota Pontianak.

Dua orang pemateri yang mengisi acara sosialisasi tersebut, yakni M Isro dan Naomi dari Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas RI.

Kepala Bappeda Kota Pontianak, Uray Indra Mulya menyatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen memberantas korupsi. Salah satunya melalui sosialisasi ini serta ditindaklanjuti dengan penyusunan AD-PPK 2015.

Selain itu Pemkot juga telah membentuk tim pemantau independen pengadaan barang dan jasa, melakukan bedah APBD, bahkan sudah empat kali berturut-turut menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Kita juga sudah melaksanakan sistem basik akrual dalam tata kelola keuangan di Pemkot," tukasnya.

Menurutnya, adanya aksi ini dalam rangka menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemkot Pontianak. Diantaranya, meningkatkan pelayanan publik, meniadakan atau memberantas pungutan liar (pungli) serta bersama-sama DPRD Kota Pontianak melakukan pencegahan kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik APBD maupun APBN.

"Agar aksi tersebut dapat diimplementasikan SKPD dan pihak terkait diharapkan dapat disusun rencana tindak lanjut. Dengan melibatkan stakeholder terkait," tutur Indra.

Rencana tindak lanjut tersebut juga diharapkan dapat dituangkan dalam rencana kerja SKPD melalui langkah konkret, terukur dan terintegrasi. "Sehingga menjadi pedoman SKPD dalam perbaikan pelayanan publik," lugasnya.

Sementara itu, panitia penyelenggara yang juga sebagai

Aksi ADPPK, jajaran Pemerintah Kota Pontianak saat menggelar sekaligus mendeklarasikan ADPPK di Aula Abdul Muis Muin, Kantor Bappeda Kota Pontianak. GUSNADI/RAKYAT KALBAR

Sekretaris Bappeda Kota Pontianak, Williarty mengatakan, sosialisasi ini digelar dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang.

"Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditetapkan setiap satu tahun," paparnya.

Maksud digelarnya sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aparatur sipil negara, khususnya mengenai tindak pidana korupsi demi terlaksananya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK).

"Sedangkan tujuannya yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi, baik berupa pencegahan maupun pemberantasan serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," tegasnya.

REPORTER: GUSNADI
REDAKTUR: ANDRY SOE